

Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal

Muhammad Haikal Efendi¹, Nur Aini²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

efendihaikal435@gmail.com¹, aininingrum77@gmail.com²

ABSTRACT

Keywords:

socioeconomic inequality, access to education, marginalized communities, inclusive education, social policy

Abstract: *Social and economic inequality is a major factor influencing access to education, particularly among marginalized communities. This study aims to analyze the relationship between socioeconomic status and educational access among urban poor populations. A quantitative research approach was employed using a survey of 120 respondents from slum areas. The data were analyzed using simple linear regression to examine the influence of household income, parental education level, and asset ownership on children's school participation. The results indicate a significant relationship between economic inequality and limited access to education, where families with lower economic capacity face barriers in funding education, transportation access, and adequate learning facilities. These findings highlight the need for policy interventions targeting vulnerable groups through educational subsidies, affirmative scholarships, and local economic empowerment programs. The study recommends integrating education and socio-economic policies as a strategy to reduce social disparities and ensure inclusive educational access.*

Kata Kunci:

ketimpangan sosial ekonomi, akses pendidikan, komunitas marginal, pendidikan inklusif, kebijakan sosial

Abstrak: Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan faktor utama yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya di kalangan komunitas marginal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status sosial ekonomi dengan akses pendidikan pada kelompok masyarakat miskin perkotaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei terhadap 120 responden yang berasal dari kawasan permukiman kumuh. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan orang tua, dan kepemilikan aset terhadap partisipasi sekolah anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara ketimpangan ekonomi dengan rendahnya akses pendidikan, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi lemah mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan, akses transportasi, dan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai. Temuan ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang menasar kelompok rentan melalui subsidi pendidikan, beasiswa afirmatif, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara kebijakan pendidikan dan sosial ekonomi sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin akses pendidikan yang inklusif.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan sosial suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang esensial untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Oleh karena itu, ketersediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, realitas sosial di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan. Ketimpangan akses ini terutama terlihat di wilayah urban, di mana kompleksitas persoalan sosial semakin memperlebar jurang antara kelompok yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Masyarakat marginal, seperti keluarga miskin yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, sering kali menghadapi hambatan struktural, ekonomi, dan kultural dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Hambatan ini mencakup keterbatasan biaya, minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan (Suhandi, 2023).

Salah satu penyebab utama ketimpangan akses pendidikan tersebut adalah ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi. Perbedaan dalam hal pendapatan, tingkat pendidikan orang tua, kepemilikan aset produktif, serta kondisi pekerjaan sangat memengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung seperti uang sekolah maupun tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan belajar, menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, seperti kawasan padat dan rentan sosial, juga turut memperburuk kualitas pembelajaran anak-anak dari kelompok marginal.

Ketimpangan pendidikan yang dialami oleh masyarakat marginal tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan. Ketika sebagian besar kelompok masyarakat tertinggal dalam aspek pendidikan, maka peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial akan semakin kecil. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Pendidikan, yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, justru menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan apabila akses terhadapnya tidak merata. Dengan demikian, pemerataan pendidikan menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkeadilan.

Permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara ketimpangan sosial ekonomi dan akses pendidikan di kalangan masyarakat marginal, khususnya di kawasan urban. Melalui pendekatan berbasis data dan analisis empiris, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Temuan dari kajian ini juga diharapkan mampu mendorong berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk berperan aktif dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari agenda keadilan sosial di Indonesia (Suhandi, 2023).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel sosial ekonomi memengaruhi akses pendidikan di kalangan masyarakat marginal. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur hubungan antara pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, serta kepemilikan aset dengan partisipasi pendidikan anak di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah permukiman padat yang secara sosial ekonomi tergolong rendah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan. Subjek penelitian terdiri atas keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan tinggal di lingkungan dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan kondisi sosial yang rentan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang mencakup variabel-variabel sosial ekonomi dan akses pendidikan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh masing-masing faktor terhadap partisipasi pendidikan. Teknik ini digunakan untuk

memperoleh pemahaman yang objektif dan terukur mengenai pola ketimpangan sosial ekonomi serta dampaknya terhadap akses pendidikan formal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Sosial Ekonomi Keluarga Marjinal

Hasil studi menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi keluarga marginal ditandai oleh tingkat pendapatan yang rendah, pendidikan orang tua yang terbatas, serta keterbatasan dalam kepemilikan aset. Sebagian besar kepala keluarga bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kaki lima, atau pekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Tingkat pendidikan orang tua umumnya tidak melebihi jenjang sekolah menengah pertama, sehingga turut memengaruhi pola pikir mereka terhadap pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak mereka.

Di sisi lain, kepemilikan aset produktif seperti rumah sendiri, kendaraan, atau tabungan juga sangat terbatas. Banyak keluarga tinggal di rumah semi permanen atau kontrakan kecil di kawasan padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang tidak layak (Akses et al., n.d.). Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana rendahnya status sosial ekonomi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mempersempit ruang partisipasi dalam sektor pendidikan dan pembangunan manusia secara umum.

Ketimpangan struktur sosial ini memperlihatkan adanya pengelompokan sosial berdasarkan kemampuan ekonomi yang berdampak pada rendahnya mobilitas sosial vertikal. Dengan kata lain, anak-anak dari keluarga miskin berisiko besar untuk melanjutkan pola kemiskinan struktural karena keterbatasan sumber daya, kesempatan, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan berkualitas.

2. Tingkat Akses Pendidikan Anak

Partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga marginal tergolong rendah, baik dari segi angka kehadiran sekolah, kelengkapan administrasi pendidikan, hingga kelangsungan studi. Banyak ditemukan kasus keterlambatan masuk sekolah, absensi berkepanjangan, bahkan putus sekolah pada jenjang menengah pertama. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya peran orang tua dalam mendampingi proses belajar anak, serta lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif secara fisik maupun sosial.

Salah satu temuan penting adalah bahwa beban ekonomi yang tinggi menyebabkan anak-anak harus turut serta mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan bekerja paruh waktu atau membantu usaha informal keluarga. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya proses belajar dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan. Selain itu, keterbatasan dalam transportasi, tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang dekat dan layak, serta biaya-biaya tersembunyi (*hidden cost*) seperti uang kegiatan sekolah, buku, dan alat tulis juga menjadi hambatan signifikan (Hermawan et al., 2020).

Ketidakterjangkauan fasilitas pendidikan juga menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap manfaat pendidikan, khususnya jika tidak segera terlihat hasil ekonominya. Dalam banyak kasus, pendidikan dipandang sebagai beban tambahan, bukan sebagai investasi masa depan, sehingga terjadi pembiaran atau penarikan anak dari sekolah secara dini.

3. Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan dan Implikasinya

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan tingkat akses pendidikan anak. Pendapatan keluarga merupakan faktor utama yang memengaruhi kemampuan dalam membiayai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah hingga akses terhadap bimbingan belajar. Semakin stabil kondisi

ekonomi rumah tangga, semakin besar pula kemungkinan anak untuk mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Selain pendapatan, tingkat pendidikan orang tua juga terbukti berperan penting dalam menentukan pola asuh dan perhatian terhadap pendidikan anak. Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Mereka lebih mampu memberikan dukungan emosional dan strategi pembelajaran di rumah, serta mendorong anak untuk menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi.

Kepemilikan aset seperti rumah, kendaraan, atau usaha kecil menjadi indikator kestabilan ekonomi dan lingkungan belajar yang mendukung. Keluarga dengan aset cenderung memiliki kondisi tempat tinggal yang lebih nyaman, memungkinkan anak untuk belajar secara optimal. Sebaliknya, keluarga tanpa aset sering hidup dalam kondisi lingkungan yang sempit, bising, dan tidak kondusif bagi proses belajar. Ketiga aspek ini pendapatan, pendidikan orang tua, dan aset membentuk struktur sosial ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak marginal (Madiawati & Fitri, 2021).

Temuan ini memberikan dasar kuat bahwa intervensi sosial ekonomi sangat diperlukan dalam menjawab masalah ketimpangan akses pendidikan. Pemerintah perlu merancang program kebijakan afirmatif yang tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga. Bantuan pendidikan seperti beasiswa, subsidi biaya sekolah, dan penyediaan sarana belajar harus dibarengi dengan program peningkatan pendapatan keluarga, pelatihan keterampilan, serta akses usaha mikro untuk masyarakat marginal.

Lebih dari itu, kebijakan pendidikan harus bersifat inklusif dan berbasis konteks lokal. Sistem zonasi, kurikulum adaptif, dan fasilitas pendidikan berbasis komunitas bisa menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan struktural yang dihadapi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Digitalisasi pendidikan juga harus dipastikan menjangkau kelompok marginal, agar tidak menciptakan bentuk baru dari ketimpangan dalam bentuk digital divide (Regulasi et al., n.d.).

Penelitian ini juga membuka ruang refleksi bagi para pemangku kepentingan bahwa ketimpangan akses pendidikan tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga tentang ketimpangan struktur sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan intersektoral, berbasis bukti, dan berkelanjutan, guna memutus siklus ketimpangan antargenerasi melalui jalur pendidikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akses pendidikan di kalangan masyarakat marginal. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan orang tua yang terbatas, serta minimnya kepemilikan aset, secara langsung berdampak pada partisipasi pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami hambatan dalam bentuk keterlambatan masuk sekolah, ketidakhadiran, hingga putus sekolah, akibat tekanan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung proses belajar. Ketimpangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi internal keluarga, melainkan juga oleh struktur sosial yang timpang dan lemahnya intervensi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan melalui kebijakan afirmatif yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga intersektoral. Pemerintah perlu mengintegrasikan program pendidikan dengan strategi pengentasan kemiskinan, seperti pemberian subsidi pendidikan, bantuan langsung tunai yang bersyarat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar memiliki daya dukung terhadap pendidikan anak. Selain itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi pendidikan di

kalangan orang tua, khususnya dalam menyadarkan pentingnya pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Sekolah juga didorong untuk menjadi pusat layanan sosial yang inklusif dengan menjalin kemitraan bersama lembaga sosial, organisasi lokal, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, maka upaya pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta menjadi langkah nyata dalam memutus rantai ketimpangan antargenerasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih atas tersenggaranya tulisan ini hingga selesai, sehingga tulisan yang kami buat bisa di terima dan menjadi referensi dari para pembaca.

REFERENSI

- Akses, P., Pendidikan, K., Daerah, B., Penulis, T., Ruslan, A., Hudnah, A., Oktarina, H., Fatima, M., Angkur, M., Yusup, M., Laelasari, R., Santy, Y., Suwandi, S., & Nuraeni, L. (n.d.). *KESENJANGAN PENDIDIKAN*.
- Hermawan, W., Fitrawaty, ., Maipita, I., Rahman, H., & Priyono, A. F. (2020). *Determinants of Educational Access in Indonesia*. 92–98. <https://doi.org/10.5220/0009494900920098>
- Madiawati, P. N., & Fitri, J. Z. (2021). Religious : Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya The Influence of the Role of Halal Tourist Destinations on Interest in Visiting. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(1), 111–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.11615>
- Regulasi, P., Perbankan, H., Sistem, D., Konvensional, O. B., Bank, D., Studi, S. :, Terhadap, K., Terhadap, K., Syariah, P.-P., Devinka, (, Pramesti, A., Siswajanthi, F., Bahar, S., Permana, Y., Kurnia, T., Bhakti, D., & Pramesti, D. A. (n.d.). *Perbandingan Regulasi Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Suhandi, A. (2023). Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>